

LAPORAN

SKM

(SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT)



JULI 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



3EB8EF486E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Laporan ini memuat informasi mengenai metode pelaksanaan survei, responden, serta analisis terhadap 9 unsur pelayanan publik sebagai pembentuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan survei ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan dan pembenahan penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Bandung, 15 Agustus 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

3EB8EF486E

EXECUTIVE SUMMARY

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat engan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat 9 pertanyaan terkait dengan 9 unsur pelayanan. SKM dilaksanakan pada tanggal 1 Juli s.d 31 Juli 2024 dengan total jumlah responden sebanyak **94** orang.

Hasil pengolahan data kuesioner SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun periode bulan Januari menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah adalah Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi sebesar **3,754**

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah **93,839** Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat bebas dari pungutan liar, umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Pelayanan Prima atau *service excellent* merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan kinerja pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pemerintah akan dianggap berhasil jika mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publiknya serta dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, Badan Kepegawaian Daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM juga merupakan salah satu upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Bidang Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan feed back/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan publik yang diberikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pengguna Layanan, sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Kinerja/kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara serentak pada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai tolak ukur capaian keberhasilan dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, digunakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai angka pembandingnya



B. Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan kegiatan SKM yaitu untuk mengetahui gambaran kinerja unit pelayanan publik secara obyektif dan transparan sebagai bahan untuk merumuskan alternatif solusi dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan.

Sasaran pelaksanaan kegiatan SKM antara lain meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan SKM, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



D. Instrumen Kegiatan

Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan publik. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan SKM dimaksud adalah kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat, terdiri atas 9 pertanyaan yang memuat 9 variabel/unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah kegiatan pengelolaan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.



9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik. Isitilah sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin dll) sedangkan istilah prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik sampai dengan tidak baik. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Tidak Baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang Baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3
4. Sangat bBik, diberi nilai persepsi 4

Kuesioner SKM secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**.

E. Metode Pelaksanaan

1. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

SKM dilaksanakan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. SKM dilaksanakan pada periode Bulan Juli 2024.

2. Jumlah Responden

Jumlah responden SKM ditentukan berdasarkan jumlah pengguna layanan pada Bulan Juli tahun 2024. Berdasarkan jumlah kuesioner yang telah diisi, jumlah total responden SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 94 orang.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner SKM online secara mandiri/ sendiri oleh masyarakat penerima layanan di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya kuesioner SKM yang telah diisi direkapitulasi oleh Tim Pelaksanaan SKM..

4. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data SKM dilakukan oleh Tim Pelaksanaan SKM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan program



pengolahan data komputer Microsoft Excel. Berikut ini langkah pengolahan datanya :

- a. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir pada *Microsoft Excel*.
- b. Masing-masing unsur pelayanan pada pertanyaan SKM diberi nilai berdasarkan “nilai rata-rata tertimbang”. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh Nilai SKM Unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM dibuatlah table informasi nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik



3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

BAB II DATA DAN ANALISIS

A. Data Kuisisioner

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana pada BAB I, dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan yang dilakukan Survei :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
 - i. Konsultasi terkait Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
 - ii. Konsultasi terkait Bidang Pengembangan Aparatur
 - iii. Konsultasi terkait Bidang Mutasi dan Promosi
 - iv. Konsultasi terkait Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

2. Nilai Per Unsur Layanan pada setiap Unit Pelayanan

a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI UNSUR LAYANAN
1	Persyaratan Layanan	92,730
2	Prosedur Layanan	92,553
3	Waktu Layanan	92,908
4	Biaya/ Tarif	100,000
5	Produk Layanan	93,085
6	Kompetensi Pelaksana	93,262
7	Perilaku Pelaksana	93,262
8	Penanganan Pengaduan	92,908
9	Sarana dan Prasarana	93,262
SKOR IKM		93,839
NILAI INDEKS		3,754



3EB8EF486E

B. Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut secara umum dilakukan dengan memprioritaskan kepada unsur-unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada unsur yang secara keseluruhan memperoleh nilai baik tetapi masih ada responden yang menyampaikan penilaian yang tidak baik. Tentunya hal tersebut juga akan menjadi pemikiran untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

3EB8EF486E

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Sesuai dengan data hasil survey maka bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan kepegawaian untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang luar biasa. Capaian nilai survey yang sangat tinggi menjadi salah satu bukti bahwa BKD Provinsi Jawa Barat bekerja dengan sangat baik dalam hal pelayanan kepegawaian.

B. Rekomendasi

Sekalipun BKD Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan nilai sangat baik dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat, tetap saja ada hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Badan Kepegawaian Daerah akan menambah kapasitas dan kapabilitas Petugas Front Office yang lebih mumpuni. Sedangkan untuk Waktu Pelayanan, para ASN akan dibekali dengan pelatihan pelayanan yang ideal dan responsif.



**DAFTAR KORESPONDEN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BULAN JULI TAHUN 2024**

Timestamp	Nama Responden	NIP	ASAL INSTANSI	ASAL OPD	No Handphone	KEPERLUAN PELAYANAN
7/5/2023 9:36:37	WINA AIDA ISWARA	19940521207082002	PEMKAB SUMEDANG	BAGIAN ORGANISASI SETDA SUMEDANG		
7/6/2023 13:47:53	Hambali	196606061989081001	Dishub Jabar	Dishub Jabar		
7/7/2023 8:15:30	Suharyanto	197812252006041009	DINAS PENDIDIKAN	SMKN 2 BANJAR		
7/10/2023 9:18:45	Ilmiawati Mardiyani	-	Universitas Sangga Buana YPKP Bandung	Universitas Sangga Buana YPKP Bandung		
7/10/2023 9:19:12	Jenada Deltanes	3112201032	Universitas Sangga Buana YPKP	Universitas Sangga Buana YPKP Bandung		
7/10/2023 9:43:16	enung rohman	196802091991031003	setda prov jabar	setda prov jabar		
7/10/2023 9:44:44	Jajang ahmad haerul	196903062007011013	Setda jabar	Biro umum		
7/10/2023 9:52:29	Setiawan	197211182007011005	Bappeda prov jabar	Bappeda prov jabar		
7/10/2023 9:53:32	ERNY ZULISTIAWATY	198002062008012003	DINAS PENDIDIKAN	SMAN 20 BANDUNG		
7/10/2023 13:31:32	Iwa sungkawa	-	Kcd wilayah 4	Kcd wilayah 4		
7/10/2023 13:43:05	Ade Suarsa	106507092922211001	SMK N 15 BANDUNG	Dinas Pendidikan		
7/10/2023 13:46:34	Solihin	197002262007011004	Dinas KUK prov jabar	Dinas KUK prov jabar		
7/11/2023 8:50:14	Rini utami, S.Pd., M.M.	196811101991012004	Sman 16 kota bandung	Disdik prov jabar		
7/11/2023 9:25:21	Saminah	19660214198812001	Sman 12 Bandung	Dinas pendidikan		
7/11/2023 9:51:56	Fakhriy ramadhan	199003232022031008	Dinas perkebunan	Dinas perkebunan		
7/11/2023 10:33:32	Risa agustin	199708092022212004	Sman 20 bandung	Disdik provinsi Jawa barat		
7/11/2023 11:32:03	R. Eris Garini	197510292002122005	SMKN 1 Dawuan	Dinas Pendidikan		
7/11/2023 13:06:46	AHMAD MUSTOFA	-	SMAN 27 Bandung	DisdikprovJabar		



3EB8EF486E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

7/11/2023 13:34:49	Zenal mugakin	1990132020121012	Disdik	SMKN 1 Pagelaran		
7/11/2023 15:15:43	N.Hani Hanariah Martasuanda	19750501998032002	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat		
7/11/2023 15:19:50	Tes Fahmi	12345	ada	ada	12345	
7/12/2023 8:57:38	Ahmad	-	SMAN 27 Bandung	DisProvJabar	082216139768	Konsultasi SKP
7/12/2023 9:32:53	Jajang Abdulrahman	197707042007011005	Provinsi jawa barat	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	081322615978	Pengambilan sk pensiun dan konsultasi pensiun
7/12/2023 10:33:59	Ino Soprano, S Pd, M.M.Pd	196307081987031009	SMKN 11 Bandung	Disdik	081286056744	Konsultasi sk pensiun
7/12/2023 11:17:42	Ali Sastra Wijaya	198004012014081001	Disdik provinsi Jawa Barat	Disdik provinsi Jawa Barat	085659337339	Cek SK pensiun
7/12/2023 14:16:58	ENDAH JUBAEDAH	197806302010012003	PEMKOT BANDUNG	DKPP	08122125172	KARIS
7/12/2023 14:45:54	Ahmad Sobari	197112242009011002	UPTD RSJ (Dinkes Jabar)	Dinkes jbar	088218139112	Progres revisi kenaikan pangkat
7/13/2023 9:13:52	Eka Asyarullah Saefudin	199008112020121011	SMKN 1 Cilaku	Dinas Pendidikan	087728353453	Perbaikan SK
7/13/2023 10:41:38	Nurjaman	196709131994011001	Bakesbangpol	Bakesbangpol	08977608467	Pengecekan ekartu
7/13/2023 10:48:28	Setiawan	197211182007011005	Bapeda Prov Jabar	Bapeda Prov Jabar	082120582136	Konsultasi dan Pengambilan Ekartu
7/13/2023 11:33:11	Dwie anggrainy	-	Disdik prof jabar	Disdik prof jabar	087722097900	Cek pensiun
7/13/2023 11:54:04	Euis piping	196303221994032001	Slbn cileunyi	Disdik jabar	081224846881	Tapera
7/13/2023 13:25:16	Agus S	197508282007011008	Setda Prov Jabar	Setda Prov Jabar	082131364837	Konsul siap jabar dan diklat PIM 2
7/13/2023 13:48:19	cecep sarbini, S.Pd	196305071995031003	disdik prov jabar	disdik prov jabar	085321595723	perbaikan sk pensiun
7/14/2023 9:17:35	Sri muhtiwati	196604241990032003	Dinas Pendidikan	Disdik	081394044848	Konsultasi TRK
7/14/2023 9:58:36	Lina Juliana	198607142014112001	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	081312821986	Kenaikan pangkat
7/14/2023 10:03:37	Hj.Sumaryah, Ir.	196302141993032002	Disdik Prov Jabar	Disdik Prov Jabar	08170249422	Konsultasi Tapera
7/14/2023 10:22:00	Umar	196212311993031070	KCD wilayah 6	Disdik prov jabar	085669762000	Konsultasi tapera
7/14/2023 10:50:14	yaya	196504241986021003	Disdik Prov Jabar	Disdik Prov Jabar	08181321287724	Konsul pensiun



3EB8EF486E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

7/14/2023 11:12:32	guruh bayu p	19840919201406101	kcd 1	disdik prov jabar	083892162354	konsultasi siap jabar
7/17/2023 8:32:28	Nurdiansyah	197101232000031002	SMAN 1 CIPEUNDEUY	Dinas Pendidikan	081313298101	Mutasi Jafung
7/17/2023 10:05:04	Hambali	196606061989081001	Dishub prov jabar	Dishub prov jabar	082119910082	Konsultasi pensiun
7/17/2023 11:18:26	Agus hendiar	196307132007011002	Sman 13 bdg	Disdik prov jabar	087815550597	Konsultasi Bapertarum
7/18/2023 8:19:45	Ester Ismayanti	197010011994032003	UPTD PPA Provinsi Jawa Barat	DP3AKB	081210591468	Konsultasi mutasi
7/18/2023 8:23:00	Ikhsan Rahmawan	199511152020121010	Pemprov Jabar	Dinas SDA	081563139408	Konsultasi Tugas Belajar
7/18/2023 9:49:15	Mariana Anisa, ST	197612252009012001	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat	085722059193	Konsultasi pencantuman gelar
7/18/2023 9:54:38	Andri Cahya Permadi	198104282014121001	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	081320300404	Pencantuman Gelar
7/18/2023 10:01:13	Toni Kusmana	198005092014081001	SMKN 11 Bandung	Dinas Pendidikan	081313093579	Penyesuaian 8jazah
7/18/2023 10:03:53	Okky T	-	Disdik	Disdik	081214555090	Penyesuaian ijazah dan pensiun
7/18/2023 11:17:19	Yoyon Muzayyin	197708082008011006	Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wil IX	Dinas Pendidikan	085221789464	Konsultasi pencantuman gelar
7/18/2023 14:16:54	Dewi Astuti Sartikasari	19850309 200801 2004	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Dislutkan Provinsi Jawa Barat	081320679613	Ijin belajar
7/20/2023 9:07:34	Marsani, S.Pd.	196708061991032010	Sdn 3 Bakunglor Jamblang Cirebon	Disdik Kab. Cirebon	085224607919	Perbaikan SK dan PAK
7/20/2023 9:53:11	Popon Ifah Sofiyah, S.Pd.	196311231983052005	SMKN 2 Kab. Sumedang	Disdik Prov Jabar	085222711963	Konsultasi Pensiun
7/20/2023 10:23:39	Slamet	-	Dinas Pendidikan	SMAN 1 Luragung	08121468918	Siap Jabar
7/20/2023 10:26:20	Raya Nadlira	199401272022212017	SMAN 3 Bandung	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat		Seting Kmob
7/20/2023 11:18:12	Heni Handayani H, M.Pd	197804062009022003	SMKN 1 Karawang	Dinas Pendidikan	082114809255	Update Siap Jabar
7/20/2023 11:21:17	Eka Merdekawati	198208172010012023	SMKN 1 Karawang	Dinas Pendidikan	081385205700	Migrasi siap jabar
7/20/2023 12:09:11	Yani Mustika, S.Pd.	196302141986032003	KCD Wilayah 8	Disdik Prov Jabar	081320633314	Konsultasi Tapera
7/20/2023 13:29:29	Harni mulyani	196308171993032005	Kcd 7	Disdik prov jabar	085956591496	Konsultasi Pensiun
7/20/2023 13:40:29	Mulyono	196505091988031009	Pemprov	Disparbud	08112425280	Tapera



3EB8EF486E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

7/20/2023 14:16:34	Al Azhar	197605232006041016	Disdik Prov Jabar	Kcd wilayah 1	081316712526	Siap Jabar
7/21/2023 9:05:53	Cindera Jakawiguna, S.AP	199205192020121010	KAB. CIANJUR	BKPSDM	087720305050	Konsultasi
7/21/2023 10:50:35	Agus Maulana	197107162009011001	Sekretariat DPRD	Set DPRD	087824732756	Tindaklanjut TPP sususlan dengan Tim Kinerja
7/21/2023 10:53:26	Agus Maulana	197107162009011001	Pemprov JABAR	Set DPRD	087824731756	Konsultasi tindaklanjut TPP Sususlan
7/21/2023 10:56:17	Agus Maulana	197107162009011001	Pemprov Jabar	Set DPDR	087824731756	Sk pensiun
7/21/2023 11:09:31	H. Deni Rusmana, S.S., M.Pd.	197505022008011002	Sman 1 Ciampel Kab. Karawang	Disdik Prov Jabar	081314362333	Konsultasi Jafung
7/21/2023 13:50:45	surtika	196705061994122002	SMPN 5 Cianjur	Disdik Kab. Cianjur	082130203660	Konsultasi Pensiun dan Tapera
7/24/2023 9:49:49	Encep Ridwan	198111062010011015	Disdik Jabar	SMAN 3 Kota Bandung	085311070756	Mutasi
7/24/2023 10:47:14	acep dedi hidayat		Smkpeternakan negeri lembang	SMK N peternakan lembang	081312237137	Perihal nip p3k
7/24/2023 11:42:15	Elis Karliah	196411201984102002	Dinas Pendidikan	Kab Bandung	082120121547	Perbaikan SK PNS
7/24/2023 11:55:18	Ramlan	196805051994031009	Dinas pendidikan	Dinas pendidikan	081398911566	Mutasi
7/24/2023 14:48:14	Dida Hibarna	0	SMAN 3 CIMAHI	Dinas pendidikan	082240613125	Pensiun
7/26/2023 10:22:16	Fitriani	198908152022212007	Sman 1 bandung	Dinas pendidikan	08176997069	Kmob
7/26/2023 10:41:48	Pali supriatna	197001132014081001	Sman 24 Bandung	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	08882327424	Konsultasi kepangkatan
7/26/2023 11:37:07	Ade Mamun SST	197401102022211003	Kcd Vii	Sman 6 Bandung	082117867446	Konsultasi pensiun
7/26/2023 13:38:12	Heni Dede Rohaeni	196309171986022002	Dinas Pendidikan	SLB Terate	085220214291	Cek pensiun
7/26/2023 14:30:00	CUCU CAHYATI	-	SMAN 1 PABEDILAN	Dinas pendidikan	08383855114	PPPK
7/27/2023 9:45:55	Lela Siti Nurlaela, S.Pd	196811252005012005	SMAN 8 Bekasi	Disdik Provinsi Jawa Barat	085691359339	Pelayanan izin Belajar Dan Pensiun
7/27/2023 11:38:26	YANITA UTAMA SURYANA	-	SMA NEGERI 1 BATUJAYA	DINAS PENDIDIKAN	08569844400	Siap Jabar
7/27/2023 14:17:26	Dida Hibarna	0	SMAN 3 CIMAHI	Dinas pendidikan	082240613125	Pensiun
7/27/2023 14:28:26	M. Rizal Firdaus	-	Pemprov jabar	Dispusipda	089644906698	Konsultasi



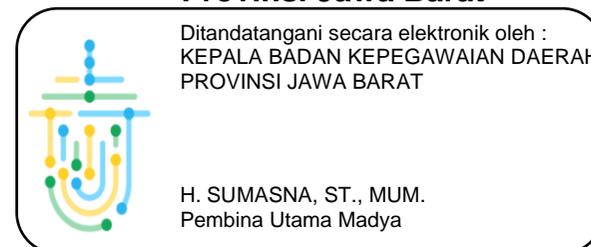
3EB8EF486E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>

7/27/2023 14:39:30	Rany Fitriani	196612311994122009	Disdik	SMKN 1 Bandung	08531564244	Bapertarum pensiun
7/28/2023 9:40:05	ASEP LILI MULIANA	198002282010011002	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat		Kepegawaian
7/28/2023 10:41:17	Daffa Rizky Fadhillah, S.IP.	-	Dinas Pendidikan	SMAN 18 Garut	082116182125	Konsultasi pemutihan izin belajar
7/28/2023 10:52:01	Dicky nurul ilham	199409182022211009	Disdik Jabar	SMKN Karangjaya		Perbaikan no SK P3K
7/28/2023 10:55:33	Asep Hidayat	198208212022211004	SMAN 18 garut	Dinas pendidikan	08983229444	Konsultasi ijin belajar
7/28/2023 15:04:58	Icih susanti	197807042009022004	Rs jiwa propinsi jawa barat	Dinas kesehatan	08122197847	Pemutihan ijin belajar
7/31/2023 9:27:53	N. Euis kartini	196404092008012002	SMKN 15 Bandung	Disdik	087825661964	K- mob
7/31/2023 9:49:47	Renna Lanyta	-	SMA N TENGAH TANI	DINAS PENDIDIKAN	081286333028	Konsultasi PPPK BTS
7/31/2023 9:56:44	Nani rohani	196306252006042002	Disdik	Disdikt	081321235939	Tapera
7/31/2023 10:11:31	Damar Wicaksana	199208142019031018	SMKN 1 Sindang Indramayu	Dinas Pendidikan	087879797200	Perbaikan SK Jafung
7/31/2023 10:19:40	Rukmana	197009222014111001	Smkn 6 bdg	Dinas pendidikan	081321601519	Perbaikan sk
7/31/2023 10:38:40	Adit Suganda	196306211987031005	Kcd 7	Disdik Prov Jabar	081321287724	Konsultasi Pensiun
7/31/2023 10:53:01	Asep nendi	197812182014081001	Sman 10 bandung kcd 7	Disdik	081292201414	Konsultasi kepegawaian
7/31/2023 11:19:20	Kamal farhan	-	DISDIK	KCD 1	081806890467	Pensiun
7/31/2023 11:46:33	Putri	-	SMAN 1 purwadadi	Disdik Jabar	081319633135	Konsultasi Karis dan Ijin belajar
7/31/2023 11:47:10	Muhamad Imam Nurdin	-	SMAN 1 PURWADADI	Disdik	081231234755	Konsultasi pengajuan ijin belajar dan pengajuan kasrsu

**Mengetahui
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3EB8EF486E>



3EB8EF486E